



# LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA**

**TAHUN ANGGARAN 2013**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA  
2014**

## Kata Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Papua ini dibuat sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*.

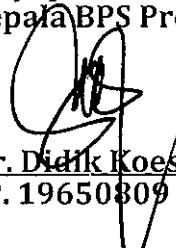
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Provinsi Papua untuk mengetahui kemampuan unit-unit kerja dalam pencapaian visi, misi dan tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan bidang statistik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BPS Provinsi Papua ini dimaksudkan untuk memberi gambaran mengenai penyelenggaraan kegiatan pelaksanaan tugas yang diberikan pemerintah kepada Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, melaksanakan koordinasi dan kerjasama serta mengembangkan dan membina hubungan dan kerjasama dalam bidang statistik dengan instansi lain, baik pemerintah maupun swasta, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan akuntabilitas kinerja ini juga sebagai masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2013 dan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik.

Kepada semua pihak yang telah berperanserta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, pimpinan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang sangat kami hargai.

Jayapura, 28 Maret 2014  
Kepala BPS Provinsi Papua,

  
Ir. Didik Koesbianto, M.Si  
NIP. 19650809 198702 1 001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Ringkasan Eksekutif	v	
Bab I	Pendahuluan	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi	2
1.3	Kewenangan	6
1.4	Landasan Hukum	6
Bab II	Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja	
2.1	Rencana Strategis 2010-2014	8
2.2	Indikator Kinerja Utama	13
2.3	Rencana Kinerja Tahunan 2013	15
2.4	Anggaran Tahun 2013	18
2.5	Penetapan Kinerja Tahun 2013	19
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	
3.1	Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2011	22
3.2	Evaluasi Kegiatan Tahun 2011	37
3.3	Akuntabilitas Keuangan Tahun 2011	39
Bab IV	Penutup	
4.1	Tinjauan Umum	41
4.2	Permasalahan dan Kendala	41
4.3	Saran Tindak Lanjut	42
Lampiran-lampiran :		
1	Struktur Organisasi	43
2	Rencana Strategis (RS)	44
3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	49
4	Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	53
5	Pengukuran Kinerja Sasaran (PKS)	63
6	Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)	67
7	Sumber Daya Manusia (SDM)	79
8	Mailling List Publikasi BPS	80

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam era keterbukaan dewasa ini, tuntutan masyarakat akan perbaikan kinerja aparatur pemerintah senantiasa disuarakan baik melalui pemberitaan media nasional maupun daerah termasuk penyelenggaraan perstatistikan pemerintah yang digawangi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, memberikan wewenang kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan. Diseminasi data statistik kepada para *stakeholder* dimaksudkan untuk mewujudkan visi BPS Provinsi Papua, yakni pelopor data statistik terpercaya untuk semua (*the agent of trustworthy statistical data for all*). Pengejawantahan visi BPS Provinsi Papua tersebut dilakukan dengan melaksanakan Pembangunan Perstatistikan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi BPS Provinsi Papua sebagai berikut:

- a) Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien;
- b) Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;
- c) Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak;
- e) Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.

Mengacu pada visi dan misi BPS, maka tujuan BPS Provinsi Papua adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;
2. Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien;
3. Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja;
4. Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan.

Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BPS Provinsi Papua adalah :

1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu;
2. Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu;
3. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data;
4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik;
5. Meningkatkan Kualitas Pengolahan Data dan Informasi Statistik;
6. Memperbaiki Sumber Daya Manusia;
7. Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS;

Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2013 BPS Provinsi Papua menetapkan 3 (tiga) program utama terdiri dari :

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPPTL);
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).

Kendala penyelesaian kegiatan dan program-program BPS Provinsi Papua secara umum disebabkan oleh :

1. Faktor kesulitan lapangan untuk memperoleh data merupakan dampak dari keterisolasian sebagian daerah. Hal tersebut berdampak langsung terhadap tidak terpenuhinya target pengumpulan data di lapangan. Khusus data sektor Pertanian, dan industri persentase pemasukan data dari lapangan masih perlu ditingkatkan. Kondisi demikian telah menjadi catatan penting pimpinan dan

*stakeholders* BPS Provinsi Papua, karena sampai dengan saat ini pemasukan datanya belum mencapai response rate 100 persen. Konsistensi data antar rincian variabel dan antar waktu, dianggap oleh sebagian konsumen data BPS Provinsi Papua perlu lebih diperhatikan;

2. Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dimiliki BPS Provinsi Papua tidak bisa dimanfaatkan secara optimal karena keterbatasan jangkauan jaringan telekomunikasi yang ada di sebagian besar wilayah Papua. Hal ini menjadi salah satu hambatan komunikasi data antar satker BPS di Papua.

Tingkat Pencapaian Tujuan Selama Tahun 2013 dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

Tujuan	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian (%)		
			2011	2012	2013
<b>Tujuan 1:</b> Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas	100 %	80,56 %	95,55	97,23	80,56
<b>Tujuan 2:</b> Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien	80,00 %	80,00 %	100	100	100
<b>Tujuan 3:</b> Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja	21	21	98,24	95,27	100
<b>Tujuan 4:</b> Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan	50,00 %	50,00%	100	98,51	100

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS seperti yang tertuang dalam visi BPS, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS Provinsi Papua menunjukkan keberhasilan. Hal ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 95,14 persen (rata-rata dari keempat tujuan). Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS Provinsi Papua.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Profesionalisme, Integritas dan Amanah yang menjadi nilai-nilai inti (*core values*) budaya kerja bagi pegawai BPS memberikan keyakinan bahwa BPS akan menjadi lebih baik dari tahun ke tahun. Seperti keinginan masyarakat Indonesia yang menuntut profesionalitas sikap dan pelaksanaan kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi salah satu ukuran untuk memenuhi tuntutan tersebut.

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN
- UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
- UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Keputusan presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik



- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
- Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah

Satu diantara inti pokok peraturan tersebut di atas adalah bahwa, setiap instansi pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

## **1.2 KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **1.2.1 Kedudukan**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007, tanggal 26 Agustus 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, kedudukan BPS Provinsi adalah sebagai berikut :

- a. BPS Provinsi adalah perwakilan BPS di daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
- b. BPS Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala.

### **1.2.2 Tugas**

BPS Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.2.3 Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPS Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan statistik dasar di provinsi ;
- b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Provinsi ;
- c. Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di provinsi ;

- d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga BPS Provinsi.

#### 1.2.4 Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, telah ditentukan struktur organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, yaitu :

- a. Kepala;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Statistik Sosial;
- d. Bidang Statistik Produksi;
- e. Bidang Statistik Distribusi;
- f. Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik;
- g. Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kepala BPS Provinsi mempunyai tugas memimpin dan membina aparatur BPS Provinsi agar berdaya guna dan berhasil guna.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan, serta urusan dalam. **Bagian Tata Usaha** terdiri dari :

1. **Subbagian Bina Program** yang bertugas melakukan penyiapan dan penyusunan rencana dan evaluasi program.
2. **Subbagian Urusan Dalam** yang bertugas melakukan surat menyurat, penggandaan kearsipan, persandian, kerumahtanggaan, pemeliharaan gedung dan lingkungan, serta urusan keamanan dan ketertiban kantor dan tempat-tempat lain yang menjadi aset kantor di lingkungan BPS Provinsi.
3. **Subbagian Kepegawaian dan Hukum** yang bertugas melakukan tata usaha kepegawaian, pengadaan dan mutasi pegawai, pembinaan pegawai, jabatan

fungsional, organisasi dan tata laksana, serta urusan hukum dan perundang-undangan.

4. **Subbagian Keuangan** yang bertugas melakukan tata usaha dan administrasi keuangan, perbendaharaan, serta urusan verifikasi dan perhitungan anggaran.
5. **Subbagian Perlengkapan** yang bertugas melakukan pengadaan, penyaluran, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan urusan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan.

**Bidang Statistik Sosial** mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik kependudukan, statistik kesejahteraan rakyat dan statistik ketahanan sosial.

Bidang Statistik Sosial terdiri dari :

1. **Seksi Statistik Kependudukan** yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana, serta evaluasi dan pelaporan statistik kependudukan.
2. **Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat** yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana dan pelaporan statistik kesejahteraan rakyat.
3. **Seksi Statistik Ketahanan Sosial** yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis sederhana dan pelaporan statistik ketahanan sosial.

Bidang Statistik Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik pertanian, statistik industri, serta statistik pertambangan, energi, dan konstruksi.

**Bidang Statistik Produksi** terdiri dari :

1. **Seksi Statistik Pertanian** yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik pertanian.
2. **Seksi Statistik Industri** yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik industri.
3. **Seksi Statistik Pertambangan, Energi, dan Konstruksi** yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik pertambangan, energi, dan konstruksi.

Bidang Statistik Distribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, pelaporan, dan pengembangan statistik harga

konsumen dan harga perdagangan besar, statistik keuangan dan harga produsen, serta statistik niaga dan jasa.

**Bidang Statistik Distribusi** terdiri dari :

1. **Seksi Harga Konsumen dan Harga Perdagangan Besar** yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik harga konsumen dan harga perdagangan besar.
2. **Seksi Statistik Keuangan dan Harga Produsen** yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik keuangan dan harga produsen.
3. **Seksi Statistik Niaga dan Jasa** yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan statistik niaga dan jasa.

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melakukan penyusunan neraca produksi, neraca konsumsi, dan analisis statistik lintas sektor.

**Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik** terdiri dari :

1. **Seksi Neraca Produksi** yang bertugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca produksi.
2. **Seksi Neraca Konsumsi** yang bertugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi, dan pelaporan neraca konsumsi.
3. **Seksi Analisis Statistik Lintas Sektor** yang bertugas melakukan analisis statistik sosial, statistik ekonomi, dan statistik lainnya.

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik mempunyai tugas melaksanakan integrasi pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik.

**Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik** terdiri dari :

1. **Seksi Integrasi Pengolahan Data** yang bertugas melakukan pengintegrasian pengolahan data statistik hasil survei, sensus, produk administrasi, dan cara lain serta data penunjang untuk sistem informasi manajemen.
2. **Seksi Jaringan dan Rujukan Statistik** yang bertugas melakukan pengelolaan layanan dan pemeliharaan jaringan komunikasi data, penghimpunan dan pengolahan rujukan statistik, serta administrasi pemberian rekomendasi kegiatan statistik sektoral.

3. **Seksi Diseminasi dan Layanan Statistik** yang bertugas melakukan pembakuan dan evaluasi publikasi, kompilasi naskah yang akan dicetak, pemantauan kelayakan publikasi, penyusunan dan penetapan alokasi distribusi publikasi, serta urusan pemberian layanan informasi statistik, perpustakaan, dan pengelolaan dokumentasi statistik.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci struktur organisasi BPS Provinsi Papua terdapat pada *Lampiran 1*.

### **1.3 KEWENANGAN**

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, Badan Pusat Statistik Provinsi mempunyai kewenangan :

- a. Penyusunan rencana daerah di provinsi secara makro di bidang statistik;
- b. Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di provinsi;
- c. Penetapan sistem informasi di bidang statistik;
- d. Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional di provinsi;
- e. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **1.4 LANDASAN HUKUM**

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dilindungi oleh perangkat hukum, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara dan pengguna statistik baik pemerintah maupun masyarakat. Dengan adanya Undang-Undang Statistik ini maka kepentingan masyarakat pengguna statistik akan terjamin terutama atas nilai informasi yang diperolehnya.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik yang mengamanatkan bahwa BPS berkewajiban menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.

- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang menetapkan kedudukan BPS sebagai lembaga pemerintah non departemen yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan statistik dasar.
- e. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.
- f. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah.

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA**

Perencanaan merupakan hal penting dalam manajemen perkantoran. Tanpa perencanaan yang baik maka sama halnya kita merencanakan kegagalan. Untuk lebih meningkatkan kemampuan kita dalam merencanakan kegiatan maka perencanaan dibagi menjadi dua yaitu perencanaan jangka pendek (tahunan) dalam hal ini disebut sebagai Penetapan Kinerja dan perencanaan jangka menengah yang disebut sebagai Rencana Strategis.

#### **2.1 Rencana Strategis BPS Provinsi Papua**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2005-2009, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Papua dalam menetapkan Rencana Strategis Tahun 2010-2014 mengacu Renstra BPS RI 2010-2014.

Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*) merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Keterbukaan atau setidaknya transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya, dan lengkap. Untuk itu, BPS Provinsi Papua perlu menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya *good governance* dan *clean government* tersebut.

Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Provinsi Papua adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Provinsi dan berlaku selama kurun waktu 2010-2014.

### **2.1.1 Visi BPS Provinsi Papua**

Visi Badan Pusat Statistik tahun 2010-2014 adalah sebagai "**pelopor data statistik terpercaya untuk semua**". Hal ini menuntut Badan Pusat Statistik Provinsi Papua sebagai penyedia data dan informasi statistik di wilayahnya menjadi semakin penting, karena data dan informasi yang di sajikan harus terpercaya. Badan Pusat Statistik bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Provinsi Papua menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang dapat disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas, di dalam maupun di luar negeri.

### **2.1.2 MISI BPS PROVINSI PAPUA**

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Badan Pusat Statistik yang mengarahkan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai tugas pokok. Misi Badan Pusat Statistik dapat dirumuskan sebagai berikut

- (i). Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;
- (ii). Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional, didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;
- (iii). Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik ;
- (iv). Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak;
- (v). Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien.



Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, Badan Pusat Statistik mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

### **2.1.3 Tujuan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua**

Tujuan Badan Pusat Statistik Papua yang mengacu pada visi dan misi BPS adalah :

- (i). Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas;
- (ii). Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien;
- (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja;
- (iv). Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan.

### **2.1.4 Sasaran Badan Pusat Statistik Provinsi Papua**

Sasaran Badan Pusat Statistik merupakan target jangka pendek atau tahunan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua yang telah ditetapkan selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran diantaranya:

#### **Tujuan 1 : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas**

Mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu:

- (i). Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu;
- (ii). Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu;

#### **Tujuan 2 : Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien**

Mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu:

- (i). Meningkatkan hubungan dengan pengguna data;
- (ii). Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik;

#### **Tujuan 3 : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja**

Mencakup 1 (satu) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu:

- (i). Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik.

**Tujuan 4 : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan**

Mencakup 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan yaitu:

- (i). Memperbaiki sumber daya manusia;
- (ii). Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

**2.1.5 Kebijakan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua**

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mengacu pada strategi pembangunan nasional di bidang statistik dalam RPJM Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Statistik Badan Pusat Statistik Tahun 2010-2014, maka arah kebijakan Badan Pusat Statistik Provinsi Papua adalah sebagai Berikut:

- a. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang handal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran.
- b. Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
- c. Memfasilitasi peningkatan penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi.
- d. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang handal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna.
- e. Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional.
- f. Memfasilitasi sarana dan prasarana aparatur negara yang mendukung terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif.
- g. Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik.
- h. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik.
- i. Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta.

- j. Mengupayakan peningkatan penguasaan dan pengembangan keahlian dibidang teknologi informasi untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui sistem elektronik survei.

#### **2.1.6 Program BPS Provinsi Papua**

Untuk dapat mencapai visi dan misi BPS Provinsi Papua maka di tahun 2013 telah ditetapkan tiga program, yaitu:

##### **a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)**

Program ini bertujuan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kegiatan kenegaraan dan pemerintahan di bidang penyediaan data statistik. Sasaran program ini adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan di bidang penyediaan data statistik di wilayah Provinsi Papua. Kegiatan-kegiatan pokok pada program ini dilaksanakan tahun 2013, yaitu:

- Menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, relevan, mutakhir, dan berkesinambungan;
- Koordinasi dengan *stakeholders*; dan
- Pembangunan kapasitas.

##### **b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja serta penyediaan sarana transportasi di wilayah Provinsi Papua.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana ini dilakukan secara bertahap setiap tahun, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional pengumpulan data di lapangan dan pengolahannya. Dengan demikian tanggung jawab BPS Provinsi Papua dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Tersedianya fasilitas penunjang yang lebih memadai akan memberi suasana kerja yang nyaman sehingga akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan mendorong terciptanya kondisi yang dapat memacu prestasi kerja. Berdasarkan kondisi tersebut maka peningkatan sarana dan prasarana fisik yang sudah ada diharapkan mampu memberi kenyamanan, kemudahan dan keamanan pada pegawai BPS di wilayah Provinsi Papua serta dapat lebih memperlancar dan mempercepat proses kegiatan statistik.

**c) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).**

Program ini dimaksudkan untuk menyempurnakan dan mengembangkan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, serta pengkajian dan analisis statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik dasar yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan, pemantauan, dan evaluasi semua bidang pembangunan serta untuk penentuan kebijakan di wilayah Provinsi Papua.

**2.2 Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, BPS Provinsi Papua menetapkan indikator kinerja utama sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**

(Peraturan Kepala BPS Nomor 45 Tahun 2012)

<b>Tujuan &amp; Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
<b>Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas</b>	Persentase pemasukan dokumen / <i>response rate</i> kegiatan survei statistik
1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap dan tepat waktu.	Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan  Persentase pemasukan dokumen / <i>response rate</i> dari kegiatan statistik perusahaan  Jumlah judul publikasi statistik Ekonomi
1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu	Persentase penyajian release data dan informasi statistik sosial dan Kesejahteraan rakyat tiap semester  Persentase pemasukan dokumen / <i>response rate</i> dari kegiatan statistik rumah tangga  Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan kesejahteraan Rakyat
1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei	Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir
<b>Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien</b>	Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS
2.1 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data	Banyaknya Penyelenggaraan Sosialisasi kegiatan BPS Provinsi  Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data  Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data

Tujuan & Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)
2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu Jumlah instansi pemerintah dan lembaga yang menerima publikasi BPS Provinsi
<b>Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja</b>	Jumlah satker Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara <i>online</i>
3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu Jumlah petugas fungsional pranata komputer dengan kualifikasi tingkat ahli
<b>Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan</b>	Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1
4.1 Memperbaiki Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang memegang jabatan fungsional tertentu
4.2Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja paratur BPS	Penyusunan LAKIP, RKT dan PK yang tepat waktu Penilaian LAKIP

### 2.3 Rencana Kinerja Tahunan 2013

Berdasarkan permintaan kebutuhan data statistik oleh berbagai pihak serta mengacu kepada RENSTRA BPS Tahun 2010-2014, maka BPS menyusun program kegiatan statistik untuk tahun 2013 ke dalam Rencana Kinerja Tahunan 2013 dengan fokus pada 3 (tiga) program yaitu :

- (i). Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)
- (ii). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA).
- (iii). Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Adapun kegiatan yang ditetapkan pada BPS Provinsi Papua pada tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

**1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL) kegiatannya, yaitu :**

**a) Pengelolaan Gaji, Honorarium dan Tunjangan**

- Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan Vakasi

**b) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran**

- Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh/Uang Makan PNS
- Pengadaan Biaya Jasa Keamanan dan Cleaning Service
- Perawatan Gedung dan Halaman Kantor
- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4
- Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2
- Perawatan Sarana Gedung
- Langganan Daya dan Jasa
- Operasional Perkantoran dan Pimpinan

**c) Pelayanan Publik atau Birokrasi**

- Penyusunan Naskah Buku Lainnya
- Sosialisasi Rutin dan Press Release
- Biaya Pameran/Visualisasi Statistik
- Penyusunan Program dan Rencana Kerja/Teknis/Program
- Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan
- Pembinaan dan Penilaian Jabatan Fungsional
- Pembinaan dan Konsultasi
- Diklat Prajabatan Gol II dan III

**4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), kegiatannya, yaitu :**

**a) Pembangunan Gedung Negara / Revitalisasi**

- Revitalisasi Gedung Kantor BPS Provinsi Papua

**5. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).**

**a) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi**

- Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi
- Survei Kegiatan Usaha Terintegrasi
- Survei Transportasi
- Survei Statistik Harga Produsen
- Survei Statistik Harga Perdagangan Besar
- Survei Statistik Harga Konsumen Dan Volume Penjualan Eceran Beras
- Survei Statistik Keuangan Daerah dan Keuangan BUMD
- Survei Perusahaan Penggunaan dan Penyerapan sarana Komunikasi dan Teknologi Informasi
- Statistik Harga Pedesaan

**b) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Produksi**

- Survei Industri Besar Sedang
- Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK)
- Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK)
- Survei Pertambangan, Energi dan Penggalian
- Survei Konstruksi
- Survei Perusahaan Peternakan dan RPH
- Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP
- Survei Perusahaan Kehutanan
- Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan
- Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian
- Survei Perusahaan Perkebunan
- Sensus Pertanian
- Survei Pendapatan Petani (SPP)

**c) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Sosial**

- SAKERNAS
- Survei Upah Dan Survei Struktur Upah
- SUSENAS



- Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (SHLI, IPB, SDLP) dan Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH)
- Statistik Politik dan Keamanan

**d) Pengembangan Metodologi Dan Sistem Informasi Statistik**

- Pengolahan Data Penunjang Statistik Sektorial Khusus Daerah
- Survei Kebutuhan Data
- MFD dan MBS yang mutakhir
- Peta Digital yang Mutakhir
- Updating Desa Baru

**e) Penyediaan Data Neraca dan Analisis Statistik**

- Survei Tendensi Konsumen
- Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba
- Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha
- Penyusunan Stok Kapital, PDB Triwulanan menurut Sektor dan Penggunaan
- PDRB menurut Pengeluaran
- Penyusunan Neraca Produksi Daerah

Dalam rencana kinerja, ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPS Provinsi Papua tahun 2013 meliputi sasaran, program, kegiatan serta indikator kinerja kegiatan.

Indikator Kinerja pada masing-masing kegiatan akan dijadikan dasar penghitungan pencapaian Sasaran Strategis. Untuk lebih jelasnya, RKT yang memuat indikator kinerja dan rencana tingkat capaiannya dapat dilihat pada Lampiran RKT.

## **2.4 ANGGARAN TAHUN 2013**

Untuk melaksanakan rencana kinerja di atas maka diperlukan biaya yang dalam hal ini telah dibiayai oleh APBN yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun Anggaran 2014. Dalam tabel disertakan secara lengkap nilai pagu anggaran yang dialokasikan untuk Satuan Kerja dirinci per program.

**PAGU ANGGARAN BELANJA BPS PROVINSI PAPUA  
TAHUN ANGGARAN 2013**

No.	Program	Pagu (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya BPS	5.402.428.000,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	18.000.000.000,-
3	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	14.724.284.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>38.126.712.000,-</b>

## 2.5 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Pada sub bab ini ditampilkan Penetapan Kinerja yang menjadi tanggung jawab kepala BPS Provinsi Papua. Target yang dicanangkan menjadi tolok ukur Indikator Kinerja yang akan dievaluasi pada akhir tahun yakni dengan membandingkan capaian atau realisasi sampai dengan akhir tahun terhadap target.

**PENETAPAN KINERJA  
BPS PROVINSI PAPUA TAHUN 2013**

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
<b>Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas</b>	Persentase pemasukan dokumen / <i>response rate</i> kegiatan survei statistik	100
1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap dan tepat waktu.	Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan	100

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
	Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan statistik perusahaan	80
	Jumlah judul publikasi statistik Ekonomi	19
1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu	Persentase penyajian release data dan informasi statistik sosial dan Kesejahteraan rakyat tiap semester	100
	Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan statistik rumah tangga	100
	Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan kesejahteraan Rakyat	4
1.3 Meningkatkan metodologi sensus dan survei	Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir	100
<b>Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang Andal, Efektif, dan Efisien</b>		
	Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS	80
2.1 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data	Banyaknya Penyelenggaraan Sosialisasi kegiatan BPS Provinsi	3
	Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data	80
	Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data	80
2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui	512

Tujuan & Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
informasi statistik	website Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu Jumlah instansi pemerintah dan lembaga yang menerima publikasi BPS Provinsi	300  19
<b>Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja</b>	Jumlah satker Kabupaten/Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online	21
5.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu Jumlah petugas fungsional pranata komputer dengan kualifikasi tingkat ahli	100  1
<b>Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan</b>	Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1	50
4.1 Memperbaiki Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu	1
4.2 Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja paratur BPS	Penyusunan LAKIP, RKT dan PK yang tepat waktu Penilaian LAKIP	3  7,0

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah-daerah.

Akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Papua merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan Rencana Strategis seperti tertuang pada BAB II.

### **3.1 Analisis Pencapaian Kinerja Tahun 2013**

Pada Subbagian ini akan dibahas Pencapaian Kinerja BPS Provinsi Papua Tahun 2012. Pembahasan mengacu pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan oleh BPS Provinsi Papua.

#### **Tujuan-1 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas**

Berbagai permasalahan banyak dijumpai dalam usaha BPS Provinsi Papua untuk menjadi penyedia data dan informasi statistik yang berkualitas. Permasalahan yang dihadapi mulai dari proses pelaksanaan pengumpulan data di lapangan sampai dengan proses pengolahan data. Berbagai strategi telah dilakukan untuk mengeliminir permasalahan-permasalahan yang ditemui. Tingkat pencapaian Tujuan 1 pada tahun 2013 yaitu sebesar 80,56 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang hanya mencapai 77,90 persen.

**Tabel 3.1 Tingkat Pencapaian Tujuan-1 Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian (%)		
			2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase pemasukan dokumen/ response rate kegiatan survei statistik	100,00	80,56	90,02	77,90	80,56

Kebutuhan akan data berkualitas sesuai dengan keinginan pemerintah serta masyarakat, telah mendorong BPS Provinsi Papua untuk menyajikan data dan informasi statistik yang terpercaya. Kualitas data sangat dipengaruhi oleh kelengkapan data dan jumlah sampel yang mewakili serta pemasukan dokumen/*response rate* yang dapat dijadikan sebagai indikator penentu. Pemasukan dokumen dari kegiatan survei BPS Provinsi Papua tahun 2013 sebesar 80,56 persen. Tingkat pencapaian sebesar ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya karena belum terpenuhinya biaya transportasi yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan survei. Analisis Sasaran Strategis yang mendukung pencapaian Tujuan 1 diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu**

Sasaran 1.1 dibangun dari beberapa aspek yang mencakup kegiatan-kegiatan bidang Statistik Produksi, Statistik Distribusi, dan Neraca Wilayah. Pada tahun 2013, rata-rata capaian sasaran ini mencapai 95,36 persen, merupakan suatu keberhasilan yang patut dibanggakan dan ditingkatkan.

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian sasaran 1.1 berdasarkan indikator kerjanya:

**Tabel 3.2 Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian (%)		
			2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase penyajian/release data dan informasi bulanan statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik perusahaan	80,00	68,87	100,00	100,00	86,09
Jumlah publikasi Statistik Ekonomi tepat waktu	19	19	100,00	100,00	100,00

Tingkat pencapaian untuk indikator kinerja yang belum memenuhi target adalah persentase pemasukan dokumen/*response rate* dari kegiatan statistik perusahaan yang baru mencapai 86,09 persen mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2012 (100 persen). Tahun 2013 merupakan tahun Sensus Pertanian. Dari 440.473 rumah tangga tani yang ditargetkan, ternyata hanya 438.568 rumah tangga saja yang didata. Beberapa wilayah di kabupaten Waropen (Kecamatan Kirihi dan Kecamatan Walani), Supiori (Desa Mapia), dan Tolikara (Kecamatan Taiyeve, Sbey, Douw, Dorman, Egiam) tidak terdata karena terbatasnya anggaran, tingkat kesulitan wilayah dan faktor keamanan. Sementara itu, dari 8.290 rumah tangga tani yang ditargetkan pada Survei Pendapatan Petani (SPP), hanya 8.270 rumah tangga saja yang berhasil didata. Terdapat 2 (dua) Blok Sensus di Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak didata karena faktor cuaca (musim angin).

Beberapa hal yang menjadi kendala pencapaian sasaran tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu khususnya pada

indikator pemasukan dokumen/*response rate* dari kegiatan statistik perusahaan adalah:

1. Rendahnya kesadaran responden, baik perusahaan maupun lembaga dalam memberikan informasi sehingga menyebabkan rendahnya *response rate* untuk beberapa kegiatan;
2. Responden pada kegiatan statistik industri adalah perusahaan. Sering terjadi terjadi kesalahan klasifikasi semula ditetapkan sebagai responden industri besar sedang dan setelah didatangi ternyata adalah perusahaan industri kecil. Selain itu juga ada beberapa perusahaan yang telah tidak beroperasi (tutup) pada saat dikunjungi dan sampel perusahaan berada jauh dari ibukota kabupaten.
3. Alamat responden dari beberapa kegiatan statistik ekonomi seringkali berpindah-pindah;
4. Untuk kegiatan pencacahan Harga Konsumen, Beberapa komoditi yang tercakup dalam survei tersebut seringkali tidak ada di pasaran;
5. Tidak konsistennya data dilapangan yang disebabkan oleh faktor internal yaitu terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan berkompoten sesuai dengan bidang tugasnya yang salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya pengalaman petugas pengumpul data (tidak melakukan *probing*).

Strategi untuk mengatasi masalah/ kendala yang ada dalam mencapai sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas frekuensi kegiatan sosialisasi tentang informasi statistik untuk menunjukkan pentingnya informasi statistik dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan;
2. Melakukan updating direktori pada kegiatan statistik industri;
3. Mengganti komoditi yang tercakup dalam kegiatan survei harga konsumen dengan jenis komoditi yang hampir sama dan menanyakan harga periode sebelumnya;



4. Melakukan pengawasan lapangan yang lebih cermat dan melakukan kunjungan ulang/revisit ke lapangan untuk mengatasi ketidakkonsistenan data.

**Sasaran 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu**

Sasaran 1.2 ini disusun dari kegiatan-kegiatan yang berada di Bidang Statistik Sosial. Tingkat pencapaian sasaran 1.2 adalah 96,85 persen. Hampir semua Indikator dari sasaran 1.2 telah memenuhi target. Terdapat 1 indikator kinerja yang belum memenuhi target yaitu Persentase pemasukan dokumen/*Response rate* dari kegiatan statistik rumah tangga, yang baru mencapai 90,56 persen, relatif mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Tabel dibawah ini menyajikan tingkat capaian sasaran 1.2 berdasarkan indikator kinerjanya :

**Tabel 3.3 Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian (%)		
			2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase penyajian/release data dan informasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat tiap semester	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase pemasukan dokumen/ Response rate dari kegiatan statistik rumah tangga	100,00	90,56	90,02	77,90	90,56
Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	4	4	100,00	100,00	100,00

Beberapa permasalahan yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk mencapai sasaran tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu adalah:

1. Pemasukan dokumen survei yang respondennya perusahaan sering melampaui batas waktu pengiriman ke BPS RI yang telah ditetapkan.
2. Pengiriman data hasil pengolahan survei rumah tangga sering mendekati batas akhir pengiriman ke BPS RI sehingga BPS Provinsi tidak maksimal dalam melakukan evaluasi dan pemeriksaan ulang.
3. Jangkauan kegiatan berdasarkan lokasi sampel blok sensus yang tersebar di beberapa daerah sulit dan kurangnya biaya transport.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan di atas, strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Menjalin komunikasi lebih intensif dengan BPS Kab/Kota serta perusahaan pemberi data dengan harapan BPS Kab/kota dapat memenuhi tenggat waktu yang ditentukan.
2. Mengirimkan ke BPS Kabupaten/Kota variabel-variabel yang ditemukan secara umum berdasarkan hasil evaluasi terhadap data triwulan sebelumnya yang akurasiya masih perlu ditingkatkan melalui evaluasi secara ketat.
3. Mengoptimalkan segala prasarana dan sarana yang dimiliki BPS Provinsi Papua dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk mengatasi kendala di lapangan termasuk kendala geografis.
4. Melakukan pengawasan lapangan yang lebih ketat dan melakukan kunjungan ulang untuk mengatasi ketidakkonsistenan data di lapangan.
5. Melakukan refreshing atau pelatihan kepada pencacah lapangan setiap awal

## **Tujuan 2 Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien**

Pemerintah sebagai abdi masyarakat berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang prima dalam berbagai macam aspek kehidupan. BPS Provinsi Papua sebagai lembaga yang mempunyai tugas menyediakan data bagi masyarakat dan pemerintah daerah serta negara berupaya untuk dapat memberikan pelayanan

yang prima dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu perwujudannya adalah dengan menyediakan dan informasi statistik yang berkualitas serta kemudahan dalam mengakses data dan informasi tersebut.

Komunikasi yang terjalin dengan baik antara BPS Provinsi Papua dengan pengguna data sangat berguna untuk meningkatkan pelayanan prima dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien. Tingkat kepuasan konsumen terhadap Kualitas pelayanan data merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan pelayanan prima instansi.

Tingkat kepuasan konsumen terhadap data BPS Provinsi Papua perlu diukur, dipantau, dan dievaluasi dalam rangka perbaikan kualitas pelayanan di masa yang akan datang. Segala bentuk kritik dan saran sangat berguna demi perbaikan dan penyempurnaan kualitas pelayanan prima. Tabel di bawah ini menunjukkan pencapaian Tujuan 2 selama 2010 – 2012.

**Tabel 3.4 Tingkat Pencapaian Tujuan-2 Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian		
			2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00

Pada tahun 2013 tingkat kepuasan konsumen terhadap ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pelayanan data yang disajikan BPS Provinsi Papua secara rata-rata telah mencapai 100 persen. Pada Tahun 2012, tujuan ini pun telah mencapai 100 persen. Pencapaian ini harus tetap dipertahankan dan perlu lebih ditingkatkan lagi sehingga kebutuhan pengguna data dapat terpenuhi. Tujuan 2 ini dijabarkan melalui 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

### Sasaran 2.1 Meningkatkan Hubungan dengan pengguna data

Pelayanan prima merupakan pelayanan terbaik yang diberikan oleh organisasi kepada konsumen sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh organisasi yang memberikan pelayanan. Konsumen adalah pihak yang pernah, akan dan sedang merasakan produk jasa dan layanan yang diberikan perusahaan. Konsumen dalam konteks ini adalah pengguna data. Dalam membangun hubungan dengan pengguna data, BPS harus mampu memahami mata rantai yang menghubungkan BPS dengan pengguna datanya yaitu melalui komunikasi dua arah. Tujuan dari hubungan ini adalah kepuasan jangka panjang yang dirasakan oleh pengguna data. Dalam rangka peningkatan dalam pelayanan prima, hubungan antara BPS dengan pengguna data perlu ditingkatkan. Berikut ini disajikan tingkat capaian sasaran 2.1 :

**Tabel 3.5 Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatkan Hubungan dengan pengguna data**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian		
			2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Banyaknya Penyelenggaraan Sosialisasi kegiatan BPS Provinsi	3	3	100,00	100,00	100,00
Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00

Sosialisasi kegiatan BPS kepada masyarakat umum merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk mempromosikan kegiatan perstatistikan dan menunjukkan eksistensi BPS di masyarakat. Tahun 2013 merupakan tahun

pelaksanaan Sensus Pertanian. Beberapa kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ST2013 di Provinsi Papua. Sosialisasi dilaksanakan melalui kegiatan wawancara di radio dan televisi lokal serta dengan melakukan apel siaga. Pencapaian untuk kegiatan ini telah mencapai 100 persen.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan prima, yang menjadi dijadikan sebagai tolak ukur adalah kepuasan dari konsumen sebagai pengguna data. Kepuasan yang dimaksud mencakup akurasi data dan cakupan data. Pada tahun 2013 kepuasan konsumen baik dari segi akurasi data dan cakupan data, telah mencapai 100 persen.

### **Sasaran 2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik**

Tingkat pencapaian sasaran ini adalah 100 persen. Indikator kinerja Utamanya meliputi jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui situs *website* BPS Provinsi Papua, jumlah pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu (PST) dan jumlah instansi pemerintah dan lembaga yang menerima publikasi BPS provinsi Papua.

Pencapaian target 512 pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui *website* BPS Propinsi Papua mengindikasikan bahwa data dan informasi statistik yang disajikan banyak dimanfaatkan oleh para pengguna data baik dari kalangan pemerintah maupun masyarakat umum. Jumlah pengunjung Pelayanan Statistik Terpadu (PST) mencapai 300 melebihi target, yaitu 240 pengunjung.

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian sasaran menurut indikator kinerja:

**Tabel 3.6 Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian		
			2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	512	512	100,00	100,00	100,00
Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu	300	300	100,00	100,00	100,00
Jumlah instansi pemerintah dan lembaga yang menerima publikasi BPS Provinsi Papua	19	19	-	100,00	100,00

Beberapa masalah/kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran peningkatan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik adalah:

1. Dalam beberapa kasus masih seringkali terjadi adanya gangguan sinyal jaringan telekomunikasi dan gangguan pemadaman listrik oleh PLN.
2. Sistem komputerisasi pencatatan buku/publikasi pustaka dan absensi tamu pengunjung sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kualitas layanan sistem terpadu (perpustakaan) di BPS Provinsi Papua;
3. Diperlukan ketegasan dalam menerapkan pelayanan satu pintu dan satu tempat. Maklumat tata tertib pengunjung harus segera disediakan yakni
4. dalam bentuk poster yang tertempel di dinding bagian dari front desk.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala yang ada dalam mencapai sasaran meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik adalah :

1. Meningkatkan kecepatan respon permintaan data secara online.

2. Memperbaiki kemudahan akses terhadap data BPS dalam layanan sistem terpadu dengan beberapa aplikasi perpustakaan dan update katalog;
3. Lebih mendekatkan publikasi-publikasi BPS Papua kepada masyarakat dengan memberikan publikasi kepada perpustakaan Pemerintah Provinsi Papua.
4. Membuat "*Statistics Corner*" di perpustakaan Universitas Cendrawasih (Uncen). Yaitu rak buku khusus berisi publikasi BPS. Sehingga tingkat pemakaian data bisa ditingkatkan di dunia akademisi.

### Tujuan-3 Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

Kemajuan teknologi saat ini semakin memudahkan konektivitas dan aksesibilitas dalam memperoleh informasi. Tuntutan faktor kecepatan untuk mengakses informasi menjadi suatu keharusan karena informasi statistik yang *out of date* menjadi kurang bermakna. Peralatan dan perlengkapan teknologi Informasi dan komunikasi mutakhir yang dimiliki BPS Propinsi Papua merupakan modal dan investasi yang besar. Dengan tersedianya Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja kualitas dan ketersediaan data dan informasi statistik dapat tersaji secara tepat, akurat, dan tepat waktu.

**Tabel 3.7 Tingkat Pencapaian Tujuan-3 Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian		
			2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah satker Provinsi / Kabupaten / Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online	21	21	100,00	100,00	100,00

Pada tahun 2013 tingkat capaian tujuan ini adalah 100 persen sesuai dengan yang ditetapkan. *Website* sebagai penyedia data yang dapat diakses oleh semua orang menjadi sarana yang wajib dimiliki oleh BPS sebagai bukti pelayanan prima

kepada masyarakat. Informasi yang ditampilkan pada *website* harus *up to date* dan bermanfaat. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi dua pilar penting dalam penyelenggaraan statistik di daerah melalui terwujudnya SDM yang profesional di bidang statistik dan komputasi statistik. Dengan dukungan TIK, maka SDM yang ada mampu mengimplementasikan dan menghasilkan data statistik secara efektif dan efisien. Indikator Kinerja Utama dari sasaran 3 tersaji sebagai berikut :

### Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik

Kapasitas Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di BPS Provinsi Papua, saat ini belum seluruhnya dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kemajuan teknologi komputasi yang diperlukan untuk mempercepat pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data yang cakupan maupun kuantitasnya semakin bertambah. Sebagai contoh, untuk mengimplementasikan statistik daerah dengan memanfaatkan TIK diperlukan sarana dan prasarana yang memadai. Sumber daya manusia yang kurang memadai baik kuantitas maupun kualitas merupakan situasi yang benar-benar memprihatinkan, khususnya di tingkat kabupaten. Hanya tersedia beberapa personil peltu/kasie IPDS yang berpendidikan minimal D IV-Statistika Komputasi. Yang lainnya otodidak, belajar secara mandiri untuk menangani permasalahan komputerisasi.

**Tabel 3.8 Tingkat Pencapaian Indikator kinerja Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi statistik**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian		
			2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah petugas fungsional pranata komputer dengan kualifikasi tingkat ahli	1	-	-	-	-



Beberapa masalah/kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran untuk meningkatkan kualitas pengolahan data dan Informasi statistik adalah:

1. Beberapa kabupaten/ kota akses internetnya lambat dan bahkan sinyal telepon selulerpun timbul tenggelam (hilang – hilang). Beberapa pengiriman surat elektronik (*e-mail*) tidak dapat dilakukan apalagi pengiriman hasil pengumpulan, pengolahan, dan diseminasi data;
2. Sumber daya manusia yang mengurus bidang IT pada seksi IPDS BPS kabupaten/ kota belum memiliki kapasitas yang memadai karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai.
3. Minat pegawai untuk beralih menjadi fungsional pranata komputer masih rendah, hal ini disebabkan oleh sulitnya untuk mengumpulkan angka kredit pada

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala yang ada dalam mencapai sasaran peningkatan kualitas pengolahan data dan Informasi statistik adalah :

1. Memperbaiki sarana dan prasarana TIK secara umum;
2. Memperbaiki organisasi kerja dan meningkatkan pengetahuan teknologi informasi dengan memberikan pelatihan-pelatihan baik secara tatap muka disisipkan dalam beberapa pertemuan (misalnya pelatihan pengolahan) maupun secara tidak langsung dengan memberikan file tutorial untuk dipelajari secara mandiri.
3. Membantu dan memfasilitasi pembuatan situs BPS kab/kota pada saat kasie/peltu berada di kantor BPS Provinsi Papua .

#### **Tujuan 4 : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan**

Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia menjadi dua hal yang saling melengkapi. Sumber daya manusia yang tangguh tanpa penataan kelembagaan yang baik maka akan membuat organisasi berjalan tanpa arah. Peningkatan kapasitas SDM dan penataan kelembagaan harus dilakukan secara seimbang. Secara umum pencapaian tujuan ke-4 ini sebesar 100 persen. Untuk mewujudkan tujuan ke-4 ini, beberapa sasaran kinerja sudah dilakukan oleh BPS Provinsi.

**Tabel 3.9 Tingkat Pencapaian Tujuan 4 : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian		
			2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I	50	50	72,27	88,43	100,00

#### 4.1 Memperbaiki sumber daya manusia

Perbaikan sumber daya ini menjadi syarat penting untuk terciptanya organisasi yang lebih baik. Perbaikan sumber daya manusia terus dilakukan baik oleh BPS RI maupun secara lokal dilakukan oleh BPS Provinsi Papua. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam usaha perbaikan sumber daya manusia dapat dilihat dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Beberapa hal yang menjadi kendala dalam hal perbaikan sumber daya manusia adalah:

1. Pelaksanaan Diklat prajabatan

Diklat prajabatan golongan II dan Golongan III yang diselenggarakan oleh BPS bekerja sama dengan BKD Kota Jayapura dan penjamin mutunya adalah Pusdiklat BPS berjalan lancar.

2. Pelaksanaan Diklat Pimpinan

Kendala yang ada dalam diklat pimpinan ini relatif tidak ada kecuali daftar tunggu dari Pusdiklat BPS. Dari 2 orang Eselon III dan 4 orang Eselon IV telah mengikuti Diklat Pimpinan.

Dari permasalahan di atas ada beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Diklat prajabatan

Agar dipusatkan di Pusdiklat BPS sehingga *core values* BPS dapat disampaikan dengan baik.

Tabel berikut ini menyajikan tingkat capaian sasaran berdasarkan indikator kinerjanya (sebutkan indikator-indikator dalam sasaran ke-1, tujuan ke-2):

**Tabel 3.10 Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Memperbaiki sumber daya manusia**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian		
			2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu	1	1	-	-	100,00

#### 4.2 Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Pelaksanaan sasaran strategis yang dilakukan perlu dievaluasi untuk melihat tingkat keberhasilan. Pengukuran tingkat keberhasilan tersebut tentunya membutuhkan beberapa indikator-indikator terkait. Pengawasan tingkat penyerapan anggaran, pelaksanaan program-program dan perubahan aset serta beberapa kegiatan lainnya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator-indikator tersebut. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam hal pengawasan dan akuntabilitas kinerja ini adalah:

1. Masalah klasik dari tahun ke tahun adalah tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi pada akhir tahun. Hal ini disebabkan karena kurangnya perencanaan penarikan anggaran.
2. Penguasaan software keuangan dan perencanaan yang sering terdapat perbaikan program. Beberapa program keuangan membutuhkan kemampuan pengoperasian komputer yang cukup tinggi. Oleh karena itu beberapa Kasubbag TU kabupaten tidak dapat melakukannya sendiri sehingga harus dibantu oleh Pelaksana Tugas Seksi lain yang relatif banyak juga tanggungjawabnya sehingga beberapa diantaranya tidak cukup cepat belajar otodidak perubahan-perubahan program.
3. Laporan SPI (Sistem Pengawasan Intern). Beberapa kesulitan terjadi dalam pengiriman SPI. Hal ini terjadi karena koneksi internet yang terbatas di beberapa kabupaten di Papua.

Berikut ini disajikan tabel yang menyajikan tingkat capaian sasaran item pengawasan dan akuntabilitas kinerja ini

**Tabel 3.11 Tingkat Pencapaian Indikator Kinerja Meningkatkan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian		
			2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyusunan LAKIP, RKT dan PK yang tepat waktu	3	3	100,00	100,00	100,00
Penilaian LAKIP	7,0	6,8	-	-	97,14

### 3.2 Evaluasi Kegiatan Tahun 2013

#### Bagian Tata Usaha

Dalam rangka usaha mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari BPS, maka seluruh satuan kerja BPS secara bersama-sama harus memperbaiki administrasi Barang Milik Negara (BMN) dan mengelola Sistem Informasi Manajemen dan Akutansi Keuangan BMN atau SIMAK BMN secara profesional. Langkah awal yang mudah dan dapat segera dilakukan antara lain membenahi inventaris barang di setiap ruangan, serta segera menatausahakan pengadaan BMN. Disamping itu buku-buku publikasi yang berada diperpustakaan baik di kantor pusat maupun daerah yang merupakan aset BPS mulai dikelola dengan baik sebagai BMN.

#### Bidang Statistik Sosial

Untuk kebutuhan sensus dan survei, wilayah administrasi terkecil desa/kelurahan dibagi habis menjadi blok sensus yang merupakan wilayah tugas petugas pengumpul data. Peta Blok Sensus yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan pada saat pembentukan Blok Sensus harus diperbaiki karena akan dipakai dan selalu dimutakhirkan terus menerus untuk survei dan sensus lainnya.

Data hasil Susenas dan Sakernas digunakan oleh pemerintah dan lembaga lainnya untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang

dilaksanakan. Data yang dihasilkan dari kegiatan bidang statistik sosial antara lain jumlah penduduk miskin, angkatan kerja, upah minimum daerah dan sebagainya.

Kekurangan biaya transport lapangan daerah sulit yang menjadi sampel Susenas dan sankernas yang masih minim mempengaruhi data yang dihasilkan pada tahun 2012.

### **Bidang Statistik Produksi**

Data utama yang dihasilkan dari kegiatan bidang statistik produksi antara lain angka ramalan produksi padi dan palawija, indeks produksi industri besar dan sedang, produksi ikan dari tempat pelelangan ikan, dan sebagainya. Sensus Pertanian dilaksanakan pada tahun 2013. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Survei Pendapatan Petani (SPP) 2013 pada November 2013. Keterbatasan anggaran ke lapangan mengakibatkan beberapa wilayah sulit tidak didata.

Beberapa data statistik pertanian sangat tergantung kepada instansi/kementerian terkait di daerah sehingga komunikasi menjadi faktor penting. Untuk itu perlu dijalin hubungan yang intensif dan kondusif dengan instansi/dinas terkait di provinsi.

### **Bidang Statistik Distribusi**

Produk utama kegiatan bidang statistik distribusi antara lain Indeks Harga Konsumen untuk menghitung inflasi, Nilai Tukar Petani, ekspor impor barang, kunjungan wisatawan asing, dan sebagainya.

Keterlambatan pengiriman data, kuesioner atau dokumen masih sering terjadi sehingga menyulitkan pengolahan data statistik distribusi yang seharusnya tanpa *time-lag*. Untuk itu perlu pemantauan dan kepedulian terhadap pengumpulan dan pengiriman dokumen tersebut.

### **Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik**

Hasil kegiatan bidang neraca dan analisis lintas sektor antara lain, pertumbuhan ekonomi, PDRB dan sebagainya. Pertumbuhan ekonomi dan PPDRB disajikan setiap tahun.

Tahun dasar PDRB akan diubah dari tahun 2000 menjadi 2010. Sedikitnya ada 4 alasan yang mendasari: (i) sudah terjadi perubahan struktur ekonomi dibandingkan dengan struktur ekonomi tahun 2000; (ii) perekonomian 2010 dianggap stabil; (iii) tersedia data hasil SP2010 dan data dasar lainnya; dan (iv) mengikuti standar internasional yang tertuang dalam *system of National Account 2008*.

### 3.3 Akuntabilitas Keuangan Tahun 2012

Pelaksanaan berbagai program kegiatan BPS Provinsi Papua pada tahun 2013 dibiayai dengan APBN dengan yang dituangkan ke dalam Bagian Anggaran 54 DIPA Tahun 2013, dengan nilai pagu bagian Anggaran 54 sebesar Rp. 27.441.851.000 yang terdiri dari program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya BPS, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS, dan Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik. Dan Pada tabel dibawah ini adalah gambaran realisasi penggunaan anggaran tahun 2012.

**Tabel 3.12 Realisasi Penggunaan Anggaran Tahun 2013 BPS Provinsi Papua**

No.	Program	Pagu 2013 (Rp.)	Realisasi s/d Desember 2013 (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas-tugas Lainnya BPS (DMPTTL)	5.402.428.000,-	4.744.398.519,-
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA)	18.000.000.000,-	16.034.115.958,-
3	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	14.308.284.000,-	9.736.580.369,-
<b>JUMLAH</b>		<b>37.710.712.000,-</b>	<b>30.515.094.846,-</b>

Pada tabel diatas untuk program DMPTTL BPS sampai bulan Desember 2013 terserap sebesar 87,86 persen. Sementara itu, untuk PSPA dan PPIS masing-masing terealisasi sebesar 89,08 persen dan 66,13 persen.

Realisasi anggaran untuk masing-masing program tidak dapat terserap 100 persen karena ada beberapa kendala/ masalah diantaranya:

1. Adanya tambahan dana berupa APBN-P 2012 mengharuskan adanya revisi DIPA. Revisi ini terjadi pada penghujung tahun tepatnya bulan Desember sehingga ada beberapa kegiatan yang anggarannya tidak sempurna penyerapannya.
2. Terdapat beberapa perubahan perencanaan awal pelaksanaan kegiatan, sehingga program PPIS tidak terserap 100 persen.

**Tabel 3.13 Realisasi Penggunaan Anggaran Dirinci menurut Jenis Belanja**

No.	Jenis Belanja	Pagu 2013 (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Desember 2013 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belanja Pegawai (51)	3.700.445.000,-	3.507.701.014,-
2	Belanja Barang (52)	16.010.267.000,-	10.973.277.874,-
3	Belanja Modal (53)	18.000.000.000,-	16.034.115.958,-
<b>JUMLAH</b>		<b>37.710.712.000,-</b>	<b>30.515.094.846,-</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Tinjauan Umum**

Akuntabilitas kinerja BPS Provinsi Papua merupakan perwujudan kewajiban BPS Provinsi Papua untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBN selama satu tahun. Penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Provinsi Papua dituangkan dalam Rencana strategis tahun 2010 - 2014, yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis di dalam 4 (empat) tujuan. Sesuai dengan visi BPS Provinsi Papua, yaitu sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, maka BPS berkewajiban untuk dapat menyediakan data yang *objective, up to date, reliable, complete, dan on time*, serta *user friendly* yang dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat.

Pada tahun 2013 rata-rata capaian Sasaran Strategis BPS Provinsi Papua sebesar 91,54 persen. Rata-rata capaian sasaran strategis terendah berasal dari sasaran 3.1 yang hanya sebesar 50 persen yang terjadi karena salah satu indikator kinerja pada sasaran ini tidak terpenuhi, yaitu jumlah petugas fungsional pranata komputer. Minat pegawai untuk beralih ke jabatan fungsional ini masih rendah karena sulit untuk memperoleh angka kredit dari jabatan fungsional ini. BPS Provinsi Papua berusaha untuk mencapai tujuannya sebagai penyedia data dan informasi yang berkualitas sesuai dengan visi dari BPS adalah "Pelopor data statistik terpercaya untuk semua (*The agent of trustworthy statistikal data for all*).

#### **4.2 Permasalahan dan Kendala Utama**

Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program kegiatan untuk mewujudkan sasaran dan tujuan yang akan dicapai diantaranya adalah :

- a. Kesulitan pengumpulan data di lapangan diantaranya adalah masih rendahnya kesadaran responden untuk memberikan jawaban, ditambah lagi jika petugas



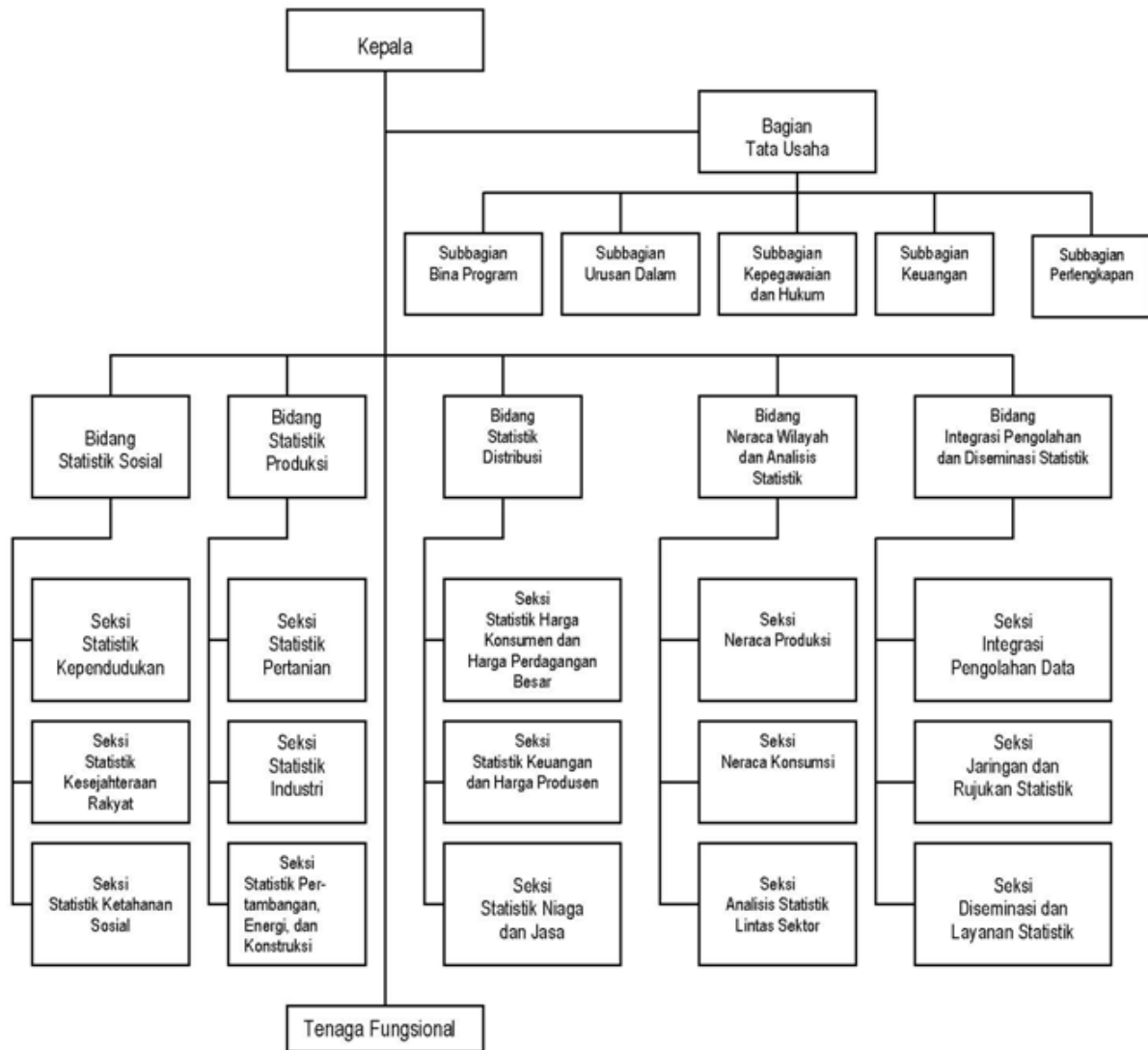
pengambil data kurang melakukan *probing* kesulitan kondisi lapangan yang sering terjadi di wilayah pedesaan dan kesulitan respon dari masyarakat yang sering terjadi di wilayah perkotaan. Kondisi medan di Papua yang relatif sulit menyebabkan terhambatnya pendataan lapangan, pengumpulan data hasil pencacahan dan ataupun data hasil pengolahan.

- b. Belum terpenuhinya ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam, rinci, mudah dipahami dan tepat waktu;
- c. Sarana dan Prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dimiliki BPS Provinsi Papua belum seluruhnya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, hal ini menyebabkan tidak hanya kurang lengkapnya data statistik yang dapat disajikan oleh BPS Provinsi Papua, tetapi menyebabkan terlambatnya penyelesaian analisis data.

#### **4.3 Saran dan Tindak Lanjut**

- a. Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1, S2 dan S3 guna pencapaian peningkatan mutu;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sosialisasi tentang informasi statistik untuk menunjukkan pentingnya informasi statistik dalam menyusun dan menetapkan kebijakan pembangunan;
- c. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta standarisasi kegiatan statistik dengan instansi terkait maupun swasta.

# Lampiran 1 (Struktur Organisasi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua)



**RENCANA STRATEGIS**  
**BPS Provinsi Papua Tahun 2010 s/d 2014**

Instansi : BPS Provinsi Papua

Visi : Pelopor data statistik terpercaya untuk semua

Misi :

1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien dengan penataan kelembagaan, dan career planning didalam seluruh unsure kekuatan BPS termasuk BPS Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
2. Menciptakan insan statistik yang kompeten dan professional didukung pemnafaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia dengan pengembangan kualitas SDM melalui STIS dan Diklat baik dari BPS maupun instansi daerah yang menyelenggarakan;
3. Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik dengan Penguatan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria);
4. Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistic bagi semua pihak dengan Penguatan Sirusa (Sistem Rujukan Statistik , Updating website serta melakukan *press release* secara kontinyu mengenai data statistik;
5. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta, dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien dengan Penguatan Sistem Statistik Nasional (SSN).

**Tujuan1 : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas**

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
a) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	<p>Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan</p> <p>Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaan</p> <p>Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi</p>	Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pmutakhiran	Penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS)
b) Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	<p>Persentase penyajian/release data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat tiap semester</p> <p>Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik rumah tangga</p> <p>Jumlah judul publikasi Statistik sosial dan kesejahteraan rakyat</p>	Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pmutakhiran	Penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS)

**Tujuan II :Meningkatkan Pelayanan Prima dalamRangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, danEfisien**

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian	Indikator Kinerja	Kebijakan	Program
(1)	(2)	(3)	(4)
a) Meningkatkan hubungan dengan pengguna data	<p>Pesentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data</p> <p>Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data</p>	Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik	Penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS)
b) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik	<p>Jumlah Pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Papua</p> <p>Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu</p> <p>Jumlah instansi pemerintah dan lembaga yang menerima publikasi BPS Provinsi</p>	Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta	Penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS)

**Tujuan III :Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja**

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian (1)	Indikator Kinerja (2)	Kebijakan (3)	Program (4)
a) Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik	<p>Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu</p> <p>Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli</p>	Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik	Penyediaan dan pelayanan informasi statistik (PPIS)

**Tujuan IV :PeningkatanKapasitas SDM danPenataanKelembagaan**

Sasaran		Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	
Uraian (1)	IndikatorKinerja (2)	Kebijakan (3)	Program (4)
a) Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu	Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)
b) Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Penyusunan LAKIP, RKT dan PK yang tepat waktu  Penilaian LAKIP	Memelopori peningkatan kemampuan para pelaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
(Peraturan Kepala BPS No. 45 Tahun 2012)

1. Nama Unit Organisasi : **BPS Provinsi Papua**
2. Tugas : Melaksanakan Penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Fungsi :
  - a. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang kegiatan statistik;
  - b. Penyelenggaraan statistik dasar;
  - c. Koordinasi Kegiatan Fungsional pelaksanaan tugas BPS ;
  - d. Fasilitas dan terhadap kegiatan instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistik ; dan
  - e. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	<b>Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas</b>	<b>Persentase pemasukan dokumen/ response rate kegiatan survei statistik</b>	Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	Survei Kebutuhan Data



No.	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.1	Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	<p>Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan</p> <p>Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaan</p> <p>Jumlah judul publikasi Statistik Ekonomi</p>	<p>Bidang Distribusi Bidang Statistik Produksi, Bidang Statistik Sosial dan Bidang Statistik Distribusi</p> <p>Bidang Statistik Produksi, Bidang Statistik Sosial dan Bidang Statistik Distribusi</p>	<p>Advanced Release Calender</p> <p>Survei Bidang Statistik Sosial, Statistik Produksi dan Statistik Distribusi</p> <p>Katalog Publikasi BPS Provinsi</p>
1.2	Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	<p>Persentase penyajian/release data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat tiap semester</p> <p>Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik rumah tangga</p> <p>Jumlah judul publikasi Statistik sosial dan kesejahteraan rakyat</p>	<p>Bidang Sosial</p> <p>Bidang Sosial</p> <p>Bidang Sosial</p>	<p>Advanced Release Calender</p> <p>Survei Bidang Statistik Sosial</p> <p>Katalog Publikasi BPS Provinsi</p>

No.	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
2	<b>Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien</b>	<b>Persentase konsumen yang merasa puas dengan Layanan Data BPS</b>	Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	Survei Kebutuhan Data
2.1	Meningkatkan hubungan dengan pengguna data	Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data	Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	Survei Kebutuhan Data
		Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data	Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	Survei Kebutuhan Data
2.2	Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik	Jumlah Pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Provinsi Papua	Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	Statistik Pengunjung <a href="http://www.bps.go.is/bps-papua">www.bps.go.is/bps-papua</a>
		Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu	Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	Statistik Pengunjung <a href="http://www.bps.go.is/bps-papua">www.bps.go.is/bps-papua</a>
		Jumlah instansi pemerintah dan lembaga yang menerima publikasi BPS Provinsi	Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	Daftar Pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu

No.	SASARAN	INDIKATOR	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
3	<b>Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja</b>	<b>Jumlah satker Kabupaten/ Kota yang mempunyai situs web yang terhubung secara online</b>	Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	Website BPS Provinsi
3.1	Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu  Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan klasifikasi tingkat ahli	Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik  Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik	Laporan hasil pengolahan data  Simpeg
4	<b>Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan</b>	<b>Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I</b>	Bagian Tata Usaha	Simpeg
4.1	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Jumlah pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu	Bagian Tata Usaha	Simpeg
4.2	Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS	Penyusunan LAKIP, RKT dan PK yang tepat waktu  Penilaian LAKIP	Bagian Tata Usaha  Bagian Tata Usaha	

## LAMPIRAN 4

### RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BPS Provinsi Papua TAHUN 2013

#### Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan	100	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Penyajian / release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan	Jumlah BRS Statistik ekonomi	Volume BRS	36	36
	Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik usaha/perusahaan	100		Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi	Jumlah dokumen Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi	Dokumen	60	13
				Survei Kegiatan Usaha Terintegrasi Triwulanan	Jumlah Dokumen Hasil Survei Kegiatan Usaha Terintegrasi	Dokumen	336	146
				Survei Transportasi	Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan data panjang jalan (PJ) II5 dan 6	Dokumen	20	7

					Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan data Angkutan Jalan raya (AJR) II/2 dan II/3	Dokumen	38	11
					Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan data Simoppel	Dokumen	156	60
					Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan data Model III/1	Dokumen	192	122
					Jumlah Dokumen Survei Harga Monitoring HPG	Dokumen	108	72
				Survei Statistik Harga Produsen	Jumlah dokumen survei harga produsen (HP-S dan HP-K)	Dokumen	252	252
				Statistik Harga Perdagangan Besar	Jumlah Dokumen Harga Perdagangan Besar (HPB-S) Bulanan	Dokumen	1.980	1.487
					Jumlah Dokumen Survei Harga Perdagangan Besar (HPB-K2)	Dokumen	720	680
				Survei Statistik harga konsumen dan volume penjualan	Jumlah Dokumen Survei Volume Penjualan Eceran Beras	Dokumen	400	400

				eceran beras				
				Survei Statistik keuangan daerah dan keuangan BUMD	Jumlah Dokumen Survei Keuangan Daerah dan BUMD tingkat Provinsi	Dokumen	8	8
				Survei Perusahaan Penggunaan dan Penyerapan sarana Komunikasi dan Teknologi Informasi	Jumlah Dokumen Survei Perusahaan Penggunaan dan Penyerapan Sarana Komunikasi dan Teknologi informasi	Dokumen	18	15
				Survei Bidang Jasa dan Parawisata	Jumlah Dokumen VHTL	Dokumen	189	124
					Jumlah Dokumen VHTS	Dokumen	1.010	1.010
					Jumlah Dokumen VIOT	Dokumen	48	34
					Jumlah Dokumen VREST	Dokumen	1	1
					Jumlah Dokumen VOW	Dokumen	14	14
				Survey Industri Besar Sedang Tahunan	Jumlah Dokumen Hasil Survei Industri Besar Sedang Tahunan	Dokumen	30	9
				Survei Industri Besar Sedang Bulanan	Jumlah Dokumen Hasil Survei Industri Besar	Dokumen	96	46

					Sedang Bulanan			
				Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan	Jumlah Dokumen hasil Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan	Dokumen	680	301
				Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) Tahunan	Jumlah Dokumen hasil Survei IMK Tahunan 2013	Dokumen	340	314
				Survei Pertambangan, Energi dan Penggalian	Jumlah Dokumen Hasil Survei Pertambangan, Energi dan Penggalian	Dokumen	71	39
				Survei Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Survei Konstruksi Triwulanan	Dokumen	652	86
					Jumlah Dokumen Hasil Survei Konstruksi Tahunan	Dokumen	386	76
				Survei Perusahaan Peternakan dan RPH	Jumlah Dokumen Hasil Survei Perusahaan Peternakan dan RPH	Dokumen	71	71
				Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP	Jumlah Dokumen Hasil Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP	Dokumen	79	39

				Survei Perusahaan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Survei Perusahaan Kehutanan	Dokumen	168	48
				Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan	Jumlah judul buku mengenai statistik pertanian	Publikasi	2	2
				Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian	Jumlah dokumen hasil Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian	Dokumen	8	8
				Survei Perusahaan Perkebunan	Jumlah dokumen hasil Survei Perusahaan Perkebunan	Dokumen	12	10
				Pendataan Survei Tendensi Konsumen	Jumlah Dokumen Tendensi Konsumen	Dokumen	720	553
				Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba	Jumlah dokumen SKLNPT, SKTR, SKKRT	Dokumen	240	240
				Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha	Jumlah Dokumen SKSIP	Dokumen	80	39



				Penyusunan Stock Kapital, PDB Triwulanan Menurut Sektor dan Penggunaan	Jumlah Dokumen Penyusunan Stock Kapital di Daerah SKPPI SMAK	Dokumen Dokumen Dokumen	40 40 138	26 28 113
	Jumlah publikasi Statistik Ekonomi yang mempunyai ISSN/ISBN	19		Penyusunan Neraca Produksi Daerah	Jumlah Dokumen SKTNP,SKNP.  Jumlah judul publikasi Statistik ekonomi yang mempunyai ISSN/ISBN	Dokumen  Publikasi	505  19	474  19
1.2 Tersedianya data dan informasi statistic social dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	Persentase penyajian/release data dan informasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat tiap semester	100	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	BRS Statististik Sosial dan Kesra	Jumlah BRS Statistik Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat yang rilis sesuai jadwal	Publikasi	4	4
	Persentase pemasukan dokumen/ Response rate dari kegiatan statistik rumah tangga	100	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Sakernas Triwulanan dan Sakernas Tahunan	Jumlah sampel rumah tangga Sakernas Triwulan yang terkumpul tepat waktu	Dokumen	8.160	7.208
					Jumlah sampel rumah tangga	Dokumen	8.160	7.640

					Sakernas Tahunan yang terkumpul tepat waktu			
				Pengumpulan Data Survei Upah dan Survei Struktur Upah	Pemasukan Jumlah dokumen Survei Upah	Dokumen	80	19
					Pemasukan Jumlah dokumen Survei Struktur Upah	Dokumen	20	6
			SUSENAS		Jumlah sampel rumah tangga Susenas Triwulan yang berhasil diwawancara	Dokumen	12.280	10.969
					Jumlah Rumah Tangga Sampel Susenas Panel wawancara	Dokumen	200	150
					Jumlah sampel rumah tangga Susenas MKP yang berhasil di wawancara	Dokumen	3.070	2.895
				Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (SHLI, IPB, SDLP) dan Survei Perilaku Peduli Lingkungan	Pemasukan Jumlah dokumen data statistik lingkungan hidup indonesia	Dokumen	90	74
					Pemasukan Jumlah dokumen data statistik SDLP	Dokumen	40	38

				Hidup (SPPLH)	Pemasukan Jumlah dokumen data statistik SPPLH	Dokumen	283	283
				Statistik Politik dan Keamanan	Jumlah Tabel Politik dan Keamanan Polkam	Tabel	68	67
	Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	4			Jumlah judul publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat	Publikasi	4	4

**Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien**

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data	Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data	100	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Survei Kebutuhan Data	Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data BPS	Persen	100	100
	Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data	100			Persentase Konsumen yang merasa puas dengan cakupan data BPS	Persen	100	100
2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi	300	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Website BPS	Jumlah Pengunjung Eksternal yang mengakses data dan informasi Statistik melalui Website BPS	Orang	300	512

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
statistik	statistik melalui <i>website</i> BPS							
	Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS	300		Website BPS	Jumlah Pengunjung Berulang Yng mengakses website BPS	Orang	300	512
	Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu	240		Pelayanan Statistik Terpadu	Jumlah Pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu	Orang	240	300

**Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja**

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1 Meningkatkan kualitas pengolahan data dan Informasi statistik	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu	100	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Laporan Hasil pengolahan	Jumlah hasil pengolahan yang dikirim tepat waktu	Persen	100	100
	Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan kualifikasi tingkat ahli	1		Fungsional Pranata komputer	Jumlah petugas fungsional pranata komputer dengan kualifikasi tingkat ahli	Orang	1	-

**Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan**

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.1 Memperbaiki Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu	1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	Pegawai Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu	Orang	1	1
4.2 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Penyusunan LAKIP, RKT, dan PK	3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		Banyaknya Laporan LAKIP, RKT, dan PK yang tepat waktu	Laporan	3	3
	Penilaian LAKIP oleh Inspektorat	7,0			Penilaian LAKIP oleh Inspektorat		7,0	6,8

**PENGUKURAN KINERJA SASARAN BPS PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2013**

**Tujuan I :** Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap dan tepat waktu.	Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan	100,00	100,00	100,00	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
	Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan statistik perusahaan	80,00	68,87	86,09	
	Jumlah judul publikasi statistik Ekonomi	19	19	100,00	
1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu	Persentase penyajian release data dan informasi statistik sosial dan Kesejahteraan rakyat tiap semester	100,00	100,00	100,00	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
	Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan statistik rumah tangga	100,00	90,56	90,56	

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan kesejahteraan Rakyat	4	4	100,00	

**Tujuan 2** :Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data	Banyaknya Penyelenggaraan Sosialisasi kegiatan BPS Provinsi	3	3	100,00	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
	Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data	80,00	80,00	100,00	
	Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data	80,00	80,00	100,00	
2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website	512	512	100,00	
	Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu	300	300	100,00	
	Jumlah instansi pemerintah dan lembaga yang menerima publikasi BPS Provinsi	19	19	100,00	

**Tujuan 3** : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

Sasaran Startegis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Tingkat Capaian (5)	Program (6)
3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu	100,00	100,00	100,00	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
	Jumlah petugas fungsional pranata komputer dengan kualifikasi tingkat ahli	1	-	-	

**Tujuan 4** : Meningkatkan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Sasaran Startegis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)	Realisasi (4)	Tingkat Capaian (5)	Program (6)
4.1 Memperbaiki Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu	1	1	100,00	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS
	Penyusunan LAKIP, RKT dan PK yang tepat waktu	3	3	100,00	
4.2 Meningkatnya Pengawasan dan akuntabilitas kinerja paratur BPS	Penilaian LAKIP	7,00	6,80	97,14	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan



Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian	Program
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Tugas Teknis Lainnya BPS

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BPS PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2013**

**Tujuan I: Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi makro yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan	100	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Penyajian / release data dan informasi statistik ekonomi hari kerja pertama tiap bulan	Jumlah BRS Statistik ekonomi	Volume BRS	36	36	100
	Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik usaha/perusahaan	100		Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi	Jumlah dokumen Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditi	Dokumen	60	13	21,67
				Survei Kegiatan Usaha Terintegrasi Triwulanan	Jumlah Dokumen Hasil Survei Kegiatan Usaha Terintegrasi	Dokumen	336	146	43,45
				Survei Transportasi	Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan data panjang	Dokumen	20	7	35,00

					jalan (PJ) II5 dan 6				
					Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan data Angkutan Jalan raya (AJR) II/2 dan II/3	Dokumen	38	11	28,95
					Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan data Simoppel	Dokumen	156	60	38,46
					Jumlah Dokumen Hasil pengumpulan data Model III/1	Dokumen	192	122	63,54
				Survei Statistik Harga Produsen	Jumlah Dokumen Survei Harga Monitoring HPG	Dokumen	108	72	66,67
					Jumlah dokumen survei harga produsen (HP-S dan HP-K)	Dokumen	252	252	100,00
				Statistik Harga Perdagangan Besar	Jumlah Dokumen Harga Perdagangan Besar (HPB-S) Bulanan	Dokumen	1.980	1.487	75,10
					Jumlah Dokumen Survei Harga Perdagangan	Dokumen	720	680	94,44

					Besar (HPB-K2)				
				Survei Statistik harga konsumen dan volume penjualan eceran beras	Jumlah Dokumen Survei Volume Penjualan Eceran Beras	Dokumen	400	400	100,00
				Survei Statistik keuangan daerah dan keuangan BUMD	Jumlah Dokumen Survei Keuangan Daerah dan BUMD tingkat Provinsi	Dokumen	8	8	100,00
				Survei Perusahaan Penggunaan dan Penyerapan sarana Komunikasi dan Teknologi Informasi	Jumlah Dokumen Survei Perusahaan Penggunaan dan Penyerapan Sarana Komunikasi dan Teknologi informasi	Dokumen	18	15	83,33
				Survei Bidang Jasa dan Parawisata	Jumlah Dokumen VHTL	Dokumen	189	124	65,61
					Jumlah Dokumen VHTS	Dokumen	1.010	1.010	100,00
					Jumlah Dokumen VIOT	Dokumen	48	34	70,83
					Jumlah Dokumen VREST	Dokumen	1	1	100,00
					Jumlah Dokumen VOW	Dokumen	14	14	100,00
				Survey Industri Besar Sedang	Jumlah Dokumen Hasil Survei	Dokumen	30	9	30,00

				Tahunan	Industri Besar Sedang Tahunan				
				Survei Industri Besar Sedang Bulanan	Jumlah Dokumen Hasil Survei Industri Besar Sedang Bulanan	Dokumen	96	46	47,92
				Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan	Jumlah Dokumen hasil Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan	Dokumen	680	301	44,26
				Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) Tahunan	Jumlah Dokumen hasil Survei IMK Tahunan 2013	Dokumen	340	314	92,35
				Survei Pertambangan, Energi dan Penggalian	Jumlah Dokumen Hasil Survei Pertambangan, Energi dan Penggalian	Dokumen	71	39	54,93
				Survei Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Survei Konstruksi Triwulanan	Dokumen	652	86	13,19
					Jumlah Dokumen Hasil Survei Konstruksi Tahunan	Dokumen	386	76	19,69
					Jumlah Dokumen Hasil Survei Perusahaan Peternakan dan	Dokumen	71	71	100,00

					RPH				
				Survei Perusahaan Peternakan dan RPH	Jumlah Dokumen Hasil Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP	Dokumen	79	39	49,37
				Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP	Jumlah Dokumen Hasil Survei Perusahaan Kehutanan	Dokumen	168	48	28,57
				Survei Perusahaan Kehutanan	Rumah tangga Tani hasil Sensus Pertanian 2013	Ruta	440.473	438.658	99,59
				Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan	Jumlah rumah tangga Survei Pendapatan Petani (SPP)	Ruta	8.290	8.270	99,76
				Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator	Jumlah dokumen hasil Survei Perusahaan Hortikultura dan Indikator Pertanian	Dokumen	8	8	100,00
					Jumlah dokumen hasil Survei Perusahaan Perkebunan	Dokumen	12	10	83,33
					Jumlah Dokumen Tendensi	Dokumen	720	553	76,81

				Pertanian	Konsumen				
				Survei Perusahaan Perkebunan	Jumlah dokumen SKLNPT, SKTR, SKKRT	Dokumen	240	240	100,00
					Jumlah Dokumen SKSIP	Dokumen	80	39	48,75
				Pendataan Survei Tendensi Konsumen	Jumlah Dokumen Penyusunan Stock Kapital di Daerah	Dokumen	40	26	65,00
				Penyusunan Neraca Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba	SKPPI	Dokumen	40	28	70,00
				Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha	SMAK	Dokumen	138	113	81,88
				Penyusunan Stock Kapital, PDB	Jumlah Dokumen SKTNP,SKNP.	Dokumen	505	474	93,86
				Triwulanan Menurut Sektor dan Penggunaan	Jumlah judul publikasi Statistik ekonomi yang mempunyai ISSN/ISBN	Publikasi	13	11	84,62
				Penyusunan Neraca Produksi Daerah					

	Jumlah publikasi Statistik Ekonomi yang mempunyai ISSN/ISBN	13							
1.2 Tersedianya data dan informasi statistic social dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu	Persentase penyajian/release data dan informasi statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat tiap semester	100	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	BRS Statististik Sosial dan Kesra	Jumlah BRS Statistik Sosial Dan Kesejahteraan Rakyat yang rilis sesuai jadwal	Publikasi	4	4	10,00
	Persentase pemasukan dokumen/ Response rate dari kegiatan statistik rumah tangga	100	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Sakernas Triwulanan dan Sakernas Tahunan	Jumlah sampel rumah tangga Sakernas Triwulan yang terkumpul tepat waktu	Dokumen	8.160	7.208	88,33
					Jumlah sampel rumah tangga Sakernas Tahunan yang terkumpul tepat waktu	Dokumen	8.160	7.640	93,63
				Pengumpulan Data Survei Upah dan Survei Struktur Upah	Pemasukan Jumlah dokumen Survei Upah	Dokumen	80	19	23,75
					Pemasukan Jumlah dokumen Survei Struktur Upah	Dokumen	20	6	30,00
				SUSENAS	Jumlah sampel	Dokumen	12.280	10.969	89,32



					rumah tangga Susenas Triwulan yang berhasil diwawancara				
					Jumlah Rumah Tangga Sampel Susenas Panel wawancara	Dokumen	200	150	75,00
					Jumlah sampel rumah tangga Susenas MKP yang berhasil di wawancara	Dokumen	3.070	2.895	94,30
				Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup dan Tata Ruang (SHLI, IPB, SDLP) dan Survei Perilaku Peduli Lingkungan Hidup (SPPLH)	Pemasukan Jumlah dokumen data statistik lingkungan hidup indonesia	Dokumen	90	74	82,22
					Pemasukan Jumlah dokumen data statistik SDLP	Dokumen	40	38	95,00
					Pemasukan Jumlah dokumen data statistik SPPLH	Dokumen	283	283	100,00
				Statistik Politik dan Keamanan	Jumlah Tabel Politik dan Keamanan Polkam	Tabel	68	67	98,53

	Jumlah judul publikasi Statistik Sosial dan Kesejahteraan Rakyat	5			Jumlah judul publikasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat	Publikasi	5	5	100,00
1.3. Meningkatkan metodologi sensus dan survei	Persentase peta wilayah administrasi dan blok sensus yang mutakhir	100	Penyediaan dan pelayanan data statistik	Pengembangan dan Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik Berdasarkan Hasil Pemutakhiran MFD dan MFBS	Jumlah MFD dan MBS yang mutakhir	Desa	350	350	100,00
					Jumlah Peta Digital Desa yang mutakhir	Peta	43	43	100,00
					Kompilasi Peta Digital Desa Baru	Kec	19	19	100,00
					Jumlah Updating Peta Desa	Peta	43	43	100,00

**Tujuan II: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien**

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.1 Meningkatkan hubungan dengan pengguna data	Persentase konsumen yang merasa puas terhadap akurasi data	100	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Survei Kebutuhan Data	Persentase konsumen yang merasa puas dengan akurasi data BPS	Persen	100	100	100
	Persentase konsumen yang merasa puas terhadap cakupan data	100			Persentase Konsumen yang merasa puas dengan cakupan data BPS	Persen	100	100	100
2.2 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui <i>website</i> BPS	300	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Website BPS	Jumlah Pengunjung Eksternal yang mengakses data dan informasi Statistik melalui Website BPS	Orang	300	512	170,66
	Jumlah pengunjung berulang yang menggunakan data BPS	300		Website BPS	Jumlah Pengunjung Berulang Yng mengakses website BPS	Orang	300	512	170,66
	Jumlah pengunjung yang datang ke pelayanan statistik terpadu	240	Pelayanan Statistik Terpadu	Jumlah Pengunjung yang datang ke Pelayanan Statistik Terpadu	Orang	240	300	125,00	

**Tujuan III: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja**

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.1 Meningkatkan kualitas pengolahan data dan Informasi statistik	Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Pusat tepat Waktu	100	Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Laporan Hasil pengolahan	Jumlah hasil pengolahan yang dikirim tepat waktu	Persen	100	100	100
	Jumlah Petugas fungsional pranata komputer dengan kualifikasi tingkat ahli	1		Fungsional Pranata komputer	Jumlah petugas fungsional pranata komputer dengan kualifikasi tingkat ahli	Orang	1	-	-

**Tujuan IV: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan**

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.1 Memperbaiki Sumber Daya Manusia	Jumlah Pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu	1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	Pegawai Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah Pegawai yang memangku jabatan fungsional tertentu	Orang	1	1	100,00

Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Output	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4.2 Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Penyusunan LAKIP, RKT, dan PK	3	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		Banyaknya Laporan LAKIP, RKT, dan PK yang tepat waktu	Laporan	3	3	100,00
	Penilaian LAKIP oleh Inspektorat	7,0			Penilaian LAKIP oleh Inspektorat		7,0	6,8	97,14

**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA BPS PROVINSI PAPUA  
MENURUT UNIT ORGANISASI DAN JENJANG PENDIDIKAN TAHUN 2013**

No.	Unit Organisasi	Jenjang Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	SLTP	SD	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kepala BPS Provinsi	-	1	-	-	-	-	-	<b>1</b>
2	Bagian Tata Usaha	-	1	7	3	16	-	-	<b>27</b>
3	Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik	-	-	5	-	1	-	-	<b>6</b>
4	Bidang Statistik Distribusi	-	1	6	-	3	-	-	<b>10</b>
5	Bidang Statistik Produksi	-	1	4	1	2	-	-	<b>8</b>
6	Bidang Statistik Sosial	-	2	4		2	-	-	<b>8</b>
7	Bidang IPDS	-	2	4	-	2	-	-	<b>8</b>
<b>JUMLAH</b>			<b>8</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>26</b>		-	<b>68</b>

**MAILING LIST PUBLIKASI BPS PROVINSI PAPUA  
TAHUN 2013**

No	JUDUL PUBLIKASI	Instansi PEMDA	Instansi Vertikal	BPS Pusat	Instansi BPS Provinsi Seluruh Indonesia	BPS Kabupaten / Kota	BPS Provinsi Papua	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Papua Dalam Angka 2012	9	-	6	32	20	8	75
2	Statistik Daerah Provinsi Papua 2012	27	-	6	32	20	15	100
3	Indeks Tendensi Konsumen Provinsi Papua Tahun 2011	-	-	6	-	20	4	30
4	Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Kota Jayapura 2012	-	-	7	-	20	3	30
5	Statistik Nilai Tukar Petani (NTP) Prov. Papua 2012	-	-	6	-	20	4	30
6	Statistik Nilai Tukar Valuta Asing Provinsi Papua 2012	-	-	6	-	20	4	30
7	Statistik Eksport dan Import Provinsi Papua 2012	-	-	7	-	20	3	30
8	Direktori Direktori Hotel Dan Penginapan Papua 2013	-	-	6	-	20	4	30

No	JUDUL PUBLIKASI	Instansi PEMDA	Instansi Vertikal	BPS Pusat	Instansi BPS Provinsi Seluruh Indonesia	BPS Kabupaten / Kota	BPS Provinsi Papua	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9	Hasil Survei Volume Penjualan Eceran Beras di Kota Putaran1 Tahun 2013	-	-	7	-	20	3	30
10	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Penginapan 2011	-	-	6	-	20	4	30
11	Statistik Perhubungan Provinsi Papua	-	-	6	-	20	4	30
12	PDRB Menurut Penggunaan Provinsi Papua 2012	-	-	6	-	20	4	30
13	PDRB Menurut Lapangan Usaha Provinsi Papua 2012	-	-	6	-	20	4	30
14	PDRB 29 Kabb/Kota se_Provnisi Papua	-	-	6	-	20	4	30
15	Laporan Pereonomian Provinsi Papua Tahun2012	-	-	6	-	20	4	30
16	Profil Industri Mikro dan Kecil Provnisi Papua	-	-	6	-	20	4	30
17	Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua 2012	-	-	6	-	20	4	30
18	Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Papua 2012	-	-	6	-	20	4	30
19	Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2012	-	-	7	-	20	3	30
20	Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Papua 2012	-	-	7	-	20	3	30



<b>No</b>	<b>JUDUL PUBLIKASI</b>	<b>Instansi PEMDA</b>	<b>Instansi Vertikal</b>	<b>BPS Pusat</b>	<b>Instansi BPS Provinsi Seluruh Indonesia</b>	<b>BPS Kabupaten / Kota</b>	<b>BPS Provinsi Papua</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>	<b>(9)</b>
21	Direktori Perusahaan Kontruksi Provinisi Papua	-	-	6	-	20	4	30
22	Statistik Air bersih Provinsi Papua Tahun 2013	-	-	6	-	20	4	30
23	Hasil Survei Volume Penjualan Eceran Beras di Kota Putaran 2 Tahun 2013	-	-	7	-	20	3	30